

**Buku :**

- Anderson, James E, *Public Policy Making*, Newyork : Holt, Renehart and Wisto, 1979.
- Cresswell, John W, *Research Design:Qualitative and Quantitative Approach*, London: Sage Publication Inc, 1994.
- Due, John F, *Keuangan Negara*, Jakarta: UI-Press, 1985.
- Dunn, William N, *Public Policy Analipsis : An Introduction second edition (terjemahan)*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003.
- Dye , Thomas R, *Understanding Public Policy*, Englemood Cliffs N.J : Prentice Hall.Inc, 1985.
- Goode, Richard, *The Individual Income Tax, The brooking Institution*, 1976.
- Gunadi, *Taxation on personal service Income (based on income tax law an tax treaty)*, Jakarta : Salemba Empat, 2001.
- Holmes, Kevin, *The Concept Of Income A Multi-Disciplinary Analysis*, Amsterdam: IBFD Publications BV, 2001.
- Hutagaol, Jhon, Darussalam, dan Septriadi, Danny, *Kapita Seleкта Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Irawan, Prasetya, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Depok : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006.
- Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, New York : The Free Press, 1999.
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Percetakan Buana Printing, 2007.
- Laswell, Harold and Abraham Kaplan, *Power and Society a Framework for Political Inquiry*, New Haven and London : Yale University Press, 1965.
- Mansury, R, *Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1999.

- \_\_\_\_\_, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid I*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta : Ind-Hill Co, 1996.
- Marsuni, Lauddin, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Moekijat, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: CV.Mandor Jaya, 1985.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhadjir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.
- Neuman, William Lawrence, *Sosial Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches 4<sup>th</sup> ed*, Boston: Allyn and Bacon, 2000.
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005.
- Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif:Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rosdiana, Haula, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- SA, Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Seltzer H. Lawrence, *The Personal Exemption in the income tax*, New York & London:Columbia University Press, 1968.
- Soemitro, Rochmat, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung : PT. Eresco, 1988.
- Sommerfield, Ray M. Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock, *An Introduction to Taxation*, New York : Harcourt Brace Jonovich Inc, 1981.
- Thuronyi, Victor, *Tax Law Design and Drafting, Chapter 14 Individual Income tax*, oleh Victor Thuronyi volume 2: International Monetary Fund, 1998.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Buku I Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat, 2003.

**Peraturan Perundang – undangan :**

Republik Indonesia, Undang – Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

\_\_\_\_\_, Undang – Undang No.10 tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

\_\_\_\_\_, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

\_\_\_\_\_, Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Menteri Keuangan, Keputusan No.1209/KMK.04/1989 tentang besarnya faktor penyesuaian untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

\_\_\_\_\_, Keputusan No.928/KMK.04/1993 tentang besarnya faktor penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

\_\_\_\_\_, Keputusan No.361/KMK.04/1998 tentang besarnya faktor penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

\_\_\_\_\_, Keputusan No.564/KMK.03/2004 tentang besarnya faktor penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

\_\_\_\_\_, Peraturan No.137/PMK.03/2005 tentang besarnya faktor penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

**Artikel :**

- Penghematan Rp 43 T (dimuat pada harian Kompas, 23 Maret 2009)
- Pro - kontra paket stimulus fiskal (dikutip dari [www.dannydarussalam.com](http://www.dannydarussalam.com), sumber : Bisnis Indonesia tanggal 16 Februari 2009)
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpeluang diubah, laju inflasi jadi pertimbangan pemerintah (dikutip dari [www.dannydarussalam.com](http://www.dannydarussalam.com), sumber : Bisnis Indonesia tanggal 21 Maret 2009)

- Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bisa tekan penerimaan pajak (dikutip dari [www.dannydarussalam.com](http://www.dannydarussalam.com), sumber : Bisnis Indonesia tanggal 27 Februari 2009)
- Fasilitas Pajak Orang Pribadi : Permen Manis Ekstensifikasi (*Indonesian Tax Review*, vol 1, edisi 12, 2008)
- Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dipermasalahkan (dimuat pada harian Kompas, 27 Februari 2009)

**Lain – lain :**

Novitasari, Dian, *Penentuan Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (Tinjauan Terhadap Kebutuhan Hidup Minimum)*, Skripsi : Program Sarjana Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Jurusan Administrasi Fiskal, 2006, tidak diterbitkan.

Widiharsanti, Lucia, *Kebutuhan Hidup Minimum Sebagai Ukuran Penetapan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*, Tesis : Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Jurusan Kebijakan Fiskal, 2003, tidak diterbitkan.

Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PUU-VII/ 2009 perihal Pengujian Undang – Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang – Undang Dasar 1945.

Risalah Rapat Panitia Kerja (PANJA) Rancangan Undang – Undang Perpajakan (PPh), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.